

PRO-KONTRA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA (ACFTA)

Nugroho SBM

*Fakultas Ekonomi Undip, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang
(email: nugroho_sbm@yahoo.co.id)*

Abstract

ASEAN-China Free Trade (ACFTA) was implemented in 2010. They are the pros using the program GTAP (Global Trade Analysis Project) indicate that the ACFTA beneficial to both ASEAN countries and China and such advantages can be enjoyed in the long run. While a counter claim that today's reality in ACFTA implementation has hurt ASEAN member countries in general and Indonesia in particular. And the fact in the short term should not wait for the solution in the long run. The policy implications that can be drawn by the Indonesian government are the government needs to continue to renegotiate the products and services that are not yet ready, optimize its trade attache in China, to diversify export destinations (not just China alone), and information dissemination on various opportunities, threats, and rules in ACFTA

Keywords : ASEAN-Free Trade Arrangement, Global Trade Analysis Project, Renegotiate, Diversify Export Destination, Dissemination information

Pendahuluan

Pada tahun 2010 telah disepakati akan diimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara China dengan negara-negara ASEAN. Ini bukanlah perjanjian perdagangan bebas pertama yang dilakukan oleh Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral. Beberapa perjanjian perdagangan bebas yang telah dilaksanakan oleh Indonesia antara lain: AFTA (perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN), antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, antara ASEAN dengan Korea Selatan, antara Indonesia dengan Jepang, keikutsertaan Indonesia dalam APEC (kerjasama antar negara-negara Asia Pasifik), dan dalam skala yang lebih luas adalah keikutsertaan Indonesia dalam WTO (Organisasi Perdagangan Bebas Dunia).

Tulisan ini akan mencoba menganalisis perdagangan bebas ASEAN-China dari dua sisi yaitu sisi pro dan kontra serta bagaimana implikasi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia agar perdagangan bebas tersebut membawa manfaat bagi Indonesia.

Landasan Teori

Secara teoritis, kerjasama perdagangan bebas antar negara akan menguntungkan negara-negara yang terlibat di dalamnya dan negara yang tidak terikat dalam perjanjian perdagangan bebas akan rugi. Semua teori arus utama (*main stream theory*) disimpulkan bahwa perdagangan bebas antar negara akan menguntungkan semua negara yang terlibat di dalamnya dan negara yang tidak terlibat akan mengalami kerugian. Keuntungan itu bisa berupa keuntungan karena efisiensi yaitu barang dan jasa bisa dibuat dengan biaya yang lebih murah sehingga harganya pun lebih murah dan keuntungan karena peningkatan produktivitas artinya dengan jam kerja yang sama bisa dihasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh negara yang tidak terlibat dalam perdagangan bebas adalah adanya deadweight loss berupa hilangnya kesempatan belajar untuk menjadi efisien karena persaingan.

Perbedaan antar teori-teori perdagangan internasional arus utama (*main stream theory*) hanya terletak pada sumber-sumber peningkatan efisiensi dan produktivitas akibat perdagangan bebas antar negara. Teori keunggulan absolut dari Adam Smith mengemukakan bahwa sumber efisiensi dan produktivitas berasal dari keunggulan absolut suatu negara karena anugerah alam (*factor endowment*) seperti sumberdaya alam yang melimpah dan sumberdaya manusia yang murah.

Sementara teori keunggulan komparatif David Ricardo lebih menekankan keunggulan relatif yang dimiliki suatu negara dibanding negara lain dalam hal biaya produksi yang bisa lebih murah dibanding negara lain.

Sementara teori Heckser-Ohlin lebih menekankan pada dimilikinya faktor-faktor produksi yang melimpah oleh suatu negara yang menyebabkan harga faktor produksi itu lebih murah dibanding di negara lain.

Teori Siklus Hidup Produk Internasional (International Lifecycle Product) dari Vernon menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena barang dan jasa yang sudah tak laku dijual di suatu negara (biasanya negara maju) bisa "muda" kembali dengan dijual di negara lain (biasanya negara sedang berkembang). Teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter menyatakan ada beberapa unsur yang bisa diciptakan oleh negara dan perusahaan untuk bersaing di pasar internasional.

Namun di samping teori-teori arus utama (*main stream theory*) yang percaya bahwa perdagangan internasional yang bebas akan menguntungkan semua negara ada juga teori non arus utama atau teori heterodoks yang berpendapat sebaliknya. Menurut teori-teori non-arus utama atau heterodoks berpendapat bahwa perdagangan bebas hanya akan saling menguntungkan kalau kekuatan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya relatif seimbang. Jika kekuatan ekonomi antar negara yang terlibat di dalam kerjasama perdagangan bebas tidak seimbang maka negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih kuat akan lebih diuntungkan dibanding negara yang lebih lemah.

Lahirnya ASEAN-China Free Trade Arrangement (ACFTA)

Sebenarnya, dasar pemikiran ACFTA telah mulai diperbincangkan sejak 10 tahun silam. Ditandai dengan penandatanganan ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation oleh para kepala negara anggota ASEAN dan Chin pada 6 November 2001.

Komitmen kerangka perjanjian ini terus dimatangkan dalam beberapa penandatanganan perjanjian pada tahun-tahun berikutnya. Indonesia pun telah meratifikasi Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 pada 15 Juni 2004.

Persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Filipina pada 2007. Sedangkan persetujuan investasi ASEAN China ditandatangani di Thailand pada 2009.

Dalam perjanjian itu pula menyepakati pelaksanaan liberalisasi penuh pada tahun 2010 terhadap enam negara ASEAN termasuk Indonesia dengan China. Menyusul di 2015, juga akan berlaku bagi negara ASEAN lainnya yakni Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar.

Seiring proses pematangan konsep perdagangan bebas itu, beberapa Keputusan Menteri Keuangan terbit untuk menyinergikan kebijakan nasional dengan perjanjian ACFTA. Salah satunya adalah tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang.

Masalah tarif bea masuk menjadi salah satu isu penting dalam kesepakatan ini. Sebab, tujuan ACFTA adalah untuk memperkecil bahkan menghilangkan hambatan perdagangan untuk meningkatkan perdagangan. Kemudian, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi dan konsumsi negara-negara anggota.

Landasan Hukum yang Keliru

Hal pertama yang perlu dikritisi adalah bahwa perjanjian internasional dalam perdagangan bebas di Indonesia adalah wewenang sepenuhnya dari pemerintah tanpa persetujuan DPR. Hal tersebut sesuai dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10, di mana disebutkan bahwa perjanjian internasional di bidang ekonomi tidak termasuk perjanjian internasional yang harus disetujui oleh DPR. Padahal di negara-negara lain, perjanjian ekonomi internasional harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR mengingat dampaknya yang begitu besar terhadap masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Maka Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 di masa yang akan datang mendesak untuk direvisi dengan mengharuskan perjanjian ekonomi internasional disetujui DPR.

Hal kedua yang perlu dikritisi adalah dampak pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas antara China dengan ASEAN pada perekonomian Indonesia. Dalam hal ini ada pendapat yang pro dan yang kontra.

Yang Pro

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yang pro. Pertama, volume perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain dan dengan China hanya 20 sampai 25 persen dari keseluruhan volume perdagangan internasional Indonesia. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan jika perdagangan bebas ASEAN- China dilaksanakan terhadap perekonomian Indonesia tidaklah besar. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain: berkurangnya penerimaan pemerintah Indonesia dari tariff (bea-masuk) dan matinya industri dalam negeri sebagai akibat kalah bersaing dengan produk dari China.

Argumen kedua yang pro ditunjukkan secara lebih ilmiah antara lain oleh Purbaya Yudhi Sadewa, ahli ekonomi Danareksa Research Institute (Kompas, 4/1/2010). Dengan menggunakan program komputer GTAP (Global Trade Analysis Project), disimulasikan dampak perdagangan bebas dengan 2 (dua) skenario. Basis data yang digunakan adalah versi 6 (tahun 2005). Skenario pertama, Indonesia terlibat dalam AFTA (perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN) dan sekaligus dalam perdagangan bebas ASEAN-China. Maka dalam skenario ini bea masuk atau bea-impor antar negara ASEAN ditetapkan nol persen, demikian juga bea-masuk atau bea-impor antara negara-negara ASEAN dengan China juga ditetapkan nol persen.

Sedangkan skenario kedua adalah Indonesia hanya ikut dalam AFTA (perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN) tetapi tidak ikut dalam perdagangan bebas ASEAN-China sementara negara-negara ASEAN lain ikut dalam perdagangan bebas ASEAN-China.

Hasil skenario pertama menunjukkan bahwa : Pertama, total ekspor Indonesia ke China akan meningkat 3.443 juta dolar AS. Kedua, ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN, kecuali ke Singapura- juga akan naik masing-masing ke Malaysia (naik 462 juta dolar AS), ke Thailand (naik 1.213 juta dolar AS), dan ke Filipina (naik 114 juta dolar AS). Ketiga, ekspor Indonesia ke Singapura turun 167 juta dolar AS. Turunnya ekspor Indonesia ke Singapura disebabkan dengan berlakunya AFTA dan Perdagangan bebas ASEAN-China maka ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN lain dan ke China tidak usah melalui Singapura. Keempat, ekspor China ke Indonesia meningkat yaitu sebesar 1.776 juta dolar AS- berarti jauh lebih rendah dari kenaikan ekspor Indonesia ke China.

Hasil skenario kedua menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, peningkatan total volume ekspor Indonesia (ke negara ASEAN lain dan ke China) lebih rendah dibanding pada skenario pertama. Kedua, ekspor Indonesia ke China justru turun 435 juta dolar AS. Ketiga, kenaikan ekspor negara-negara ASEAN ke Indonesia juga lebih tinggi dibanding pada skenario pertama karena industri di

negara-negara ASEAN lain mendapatkan input dan produk antara dari China dengan harga lebih murah (karena beamasuknya nol persen) sementara industri di Indonesia tidak.

Penelitian yang lain dengan menggunakan program GTAP menyimpulkan hal yang sama yaitu bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN akan lebih diuntungkan dengan ACFTA. Beberapa penelitian itu, antara lain: pertama, oleh Okamoto (2005) yang menyimpulkan bahwa peningkatan ekspor akan terjadi baik untuk negara-negara ASEAN maupun China. Sebabnya adalah produk andalan ASEAN yang diekspor ke China merupakan produk antara untuk produk yang diekspor China. Penelitian Yue juga menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN akan meningkat 0,9 persen yang lebih besar dari peningkatan PDB negara China sebesar 0,3 persen.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Haryadi et al (2008) dengan kesimpulan perdagangan antara China-ASEAN meningkat lebih cepat dibandingkan perdagangan antar negara ASEAN dengan keuntungan pada dua belah pihak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Endy Tjahjono, dkk (2008) yang menyimpulkan bahwa ACFTA akan menguntungkan bagi semua negara yang terlibat. Dampak untuk tiap-tiap negara akan beragam. Keuntungan besar akan dinikmati oleh Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand dibandingkan negara-negara anggota yang relatif miskin seperti: Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Tetapi simulasi dengan menggunakan program GTAP tersebut harus dibaca hati-hati sebab GTAP mempunyai beberapa kelemahan dan tidak dikemukakan oleh berbagai penulis dan peneliti yang menggunakannya. Menurut Ron Sandrey (2007) ada beberapa kelemahan model GTAP. Pertama, sebagaimana model-model statistic computer yang lain berlaku hukum GIGO (Garbage In Garbage Out) atau kalau data yang masuk sampah maka hasil atau outputnya juga sampah. Keterbatasan data yang dipakai GTAP menyangkut kebaruan dan kualitas data. Kedua kelemahan tersebut timbul karena data yang dipakai adalah data sekunder.

Kedua, model GTAP melakukan penjumlahan atau agregasi yang lumayan ekstrim. Agregasi itu adalah sector usaha di perekonomian negara-negara yang melakukan perdagangan hanya dibagi ke dalam 25 sector usaha. Akibatnya menurut Ron Sandrey hasil analisis mungkin bisa bias. Ia mengambil contoh apel segar dan apel yang diproses dijadikan satu sector yaitu buah-buahan.

Ketiga, model GTAP adalah model yang bersifat komparatif statis. Artinya hanya menganalisis keseimbangan lama (kondisi sebelum perdagangan bebas) dibandingkan dengan keseimbangan baru (kondisi setelah perdagangan bebas). Tetapi model ini tidak bisa menggambarkan gejolak atau proses dinamis perpindahan dari keseimbangan lama ke keseimbangan baru. Padahal mungkin dalam perpindahan keseimbangan itu ada berbagai "biaya" yang mesti dibayar misal keresahan sosial akibat terjadinya ledakan pengangguran. Proses perpindahan keseimbangan itu hanya bisa digambarkan dengan model-model dinamis.

Terhadap berbagai kritik yang sekarang ditujukan kepada mereka dengan melihat data realisasi perdagangan Indonesia dengan China, mereka yang pro yang kebanyakan menggunakan program GTAP menyatakan bahwa analisis GTAP adalah analisis keseimbangan dalam jangka panjang. Yang sekarang terjadi adalah hanya fenomena jangka pendek.

Yang Kontra

Yang kontra menyatakan bahwa beberapa data pelaksanaan ACFTA selama setahun menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan hal-hal yang mengkhawatirkan tersebut tidak bisa hanya dianggap fenomena jangka pendek yang sifatnya sementara karena menyangkut nasib manusia (pengusaha, buruh, dan masyarakat pada umumnya). Beberapa fakta yang mengkhawatirkan antara lain

sebagai berikut: pertama, kegiatan impor produk china ke Indonesia pada tahun 2005 tercatat hanya 12 persen dan terus meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2010. Sementara impor produk dari negara anggota ASEAN mengalami penurunan signifikan dari 28 persen pada tahun 2005 menjadi 20 persen pada 2010. Penurunan impor produk ASEAN ini dikarenakan barang-barang dari negara tersebut bersifat komplementer atau pelengkap

Kedua, nilai impor produk industri China di 2010 naik 45% menjadi US\$ 20,42 miliar dibanding 2009. Sementara itu, peningkatan nilai ekspor produk industri Indonesia ke China di 2010 hanya naik 34% dibanding 2009 yang hanya sebesar US\$ 15,69 miliar. Itu berarti, perdagangan Indonesia-China pada tahun lalu mengalami defisit hampir US\$ 5 miliar. Produk impor dari China yang mendominasi pasar di dalam negeri adalah mainan anak dengan menguasai 73% dari total impor negara pengekspor lainnya. Posisi kedua ditempati produk mebel China dengan menguasai 54%. Lantas produk elektronika menguasai 36%, tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 33% dan permesinan sebesar 22%.

Ketiga, hasil studi Vica Herawati (2010) menunjukkan bahwa pelaksanaan ACFTA telah menelan kurban industri kecil dan menengah di bidang tekstil atau garmen di kabupaten Pekalongan. Banyak UKM tekstil khususnya batik yang mulai kesulitan dan akan menutup bahkan sudah menutup usahanya karena kalah bersaing dengan produk tekstil dari China.

Argumen kedua, riset dari Purbaya Yudhi Sadewa dari Danareksa Research Institute seperti dikutip di atas menyebutkan ada beberapa sektor usaha yang terkena dampak negatif dari penerapan perdagangan bebas ASEAN- China. Beberapa sektor usaha tersebut adalah sektor-sektor usaha yang menghasilkan: produk-produk dari kulit, produk-produk logam (metal), produk manufaktur, pakaian jadi, gandum, gula, tebu dan bit gula, padi, dan beras yang diproses. Bisa saja sektor-sektor usaha yang memproduksi produk-produk yang dirugikan tersebut meskipun kecil dalam nilai perdagangannya tetapi banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga ambruknya sektor-sektor usaha tersebut mengakibatkan membengkaknya pengangguran dan dengan demikian juga kemiskinan. Padahal pengangguran dan kemiskinan saat ini merupakan musuh utama pemerintah Indonesia.

Ketiga, skenario-skenario yang dihitung dengan program komputer GTAP, menurut penulis juga masih tidak meruang dan membumi. Peningkatan ekspor Indonesia mungkin secara hitung-hitungan angka di komputer memang akan terjadi. Tetapi bilai melihat berbagai kendala nyata di lapangan maka hal tersebut kemungkinan tidak akan terjadi. Berbagai kendala tersebut antara lain: buruknya infrastruktur (misalnya jalan dan pelabuhan) yang makin diperparah dengan berbagai macam bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi, birokrasi dan pungutan-pungutan liar yang masih terjadi dalam proses ekspor, serta ketidakpastian politik akibat berlarut-larutnya kasus Bank Century, dan lain-lain.

Implikasi Kebijakan

Mau tidak mau perdagangan bebas ASEAN-China tetap harus dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan nyata yang cepat untuk mengubah ancaman menjadi peluang. Beberapa kebijakan tersebut: pertama, pemerintah perlu meneruskan langkah renegosiasi tentang produk maupun jasa yang sekiranya perlu diundurkan pelaksanaan liberalisasi atau pembebasan bea-masuknya. Renegosiasi tersebut dengan sesama negara ASEAN maupun dengan China sendiri. Langkah ini sudah dilakukan sekarang ini dan perlu dintensifkan.

Kedua, atase-atase perdagangan Indonesia baik di negara-negara ASEAN maupun China hendaknya bekerja lebih keras untuk memfasilitasi hubungan-hubungan dagang antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha di negara-negara ASEAN dan di China. Selama ini atase perdagangan tampaknya hanya sekedar asesoris diplomatik saja.

Ketiga, bagaimanapun diversifikasi pasar ekspor Indonesia harus tetap dilakukan sebagai katup pengaman dampak perdagangan bebas ASEAN-China. Salah satu pasar ekspor yang potensial yang selama ini belum banyak digarap adalah ke negara-negara Timur Tengah.

Keempat, pemerintah harus terus giat melakukan sosialisasi berbagai hal tentang perdagangan bebas ASEAN-China. Misalnya saja tentang aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dalam perdagangan bebas, sanksi bila melanggar aturan tersebut, mekanisme mengajukan gugatan bila merasa dirugikan oleh patner dagang, dan lain-lain. Hal-hal tersebut lah yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga menghadapi berbagai blok perdagangan bebas, pengusaha Indonesia masih tergap-gagap.

Penutup

Demikianlah beberapa diskusi antara yang pro dan kontra dalam melihat perdagangan bebas antara ASEAN-China (ACFTA). Dari diskusi pro dan kontra tersebut dapat ditarik implikasi kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia agar skema ACFTA menguntungkan bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

Anonim, 2010, Permasalahan dalam Pelaksanaan ACFTA, tersedia di

<http://pmmc.or.id/component/content/article/3-tabs-articles/55-permasalahan-dalam-pelaksanaan-acfta.html>

Anonim, 2010, Hasil Rapat Dengar Pendapat Pokja Nakertrans dengan DPP Serikat Pekerja Nasional, tersedia di

http://www.dpr.go.id/complorgans/commission/commission9/report/9_laporan_RDPU_POKJ_A_NAKERTRANS_DGN_DPP_SERIKAT_PEKERJA_NASIONAL_TGL_24_PEBRUARI_2010.pdf

Anonim, Dampak ACFTA, Produk China menjadi raja produk lokal tak berdaya, tersedia di

<http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/produk-china-menjadi-raja-industri-lokal-tak-berdaya>

Emil Abeng, 2010, Antisipasi Dampak Buruk ACFTA, tersedia di

<http://202.169.46.231/News/2010/01/19/Editor/edit01.htm>

Endy Tjahjono, M. Barik Bathaluddin, dan Justina Adamanti (2009): Suatu Model Financial Computable General Equilibrium .

Haryadi, Rina Oktaviani, Mangara Tambunan dan Noer Azam Achsani, 2008, Dampak Penghapusan Hambatan Perdagangan Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Ekonomi Negara Maju dan Berkembang .

Ibrahim, Meily Ika Permata, dan Wahyu Ari Wibowo, 2010, Dampak Pelaksanaan ACFTA Terhadap Perdagangan International Indonesia, tersedia di *<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8E17FA47-1493-4B36-91ED-C16248D031F5/21625/Ibrahim.pdf>*

Khamim Nugroho, Bob Widyahartono, 2010, Persaingan Antar Produk Setelah Berlakunya ACFTA , tersedia di <http://id.shvoong.com/social-sciences/1968011-persaingan-antar-produk-setelah-berlakunya/#ixzz1PDsIHODK>

Okamoto, Yumiko (2005), ASEAN, China, and India: Are they more competitive or complementary to each other?

Purbaya Yudhi Sadewa, 2010, “Sebaiknya tidak Ikut FTAASEAN-China?”, Kompas, 4 Januari 2010

Vica Herawati, 2010, Analisis Pengaruh ASEAN-China Free Trade Arrangement (ACFTA) Terhadap Kinerja Keuangan yang Dilihat dari Penjualan Pada UKM Tekstil di Pekalongan, skripsi FE Undip tidak diterbitkan, Semarang